

RESPONSIBILITAS PELAYANAN KEGIATAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL DI PUSKESMAS CILENGKRANG DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA ERADIKASI POLIO

Metha Dwi Tamara

Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, STIKes Dharma Husada

Email korespondensi : metha.stikesdhh@gmail.com

ABSTRAK

Pekan Imunisasi Nasional (PIN) ini dilakukan dikarenakan kasus Polio yang kembali muncul di Indonesia yaitu di Aceh dan Purwakarta. Berdasarkan laporan cakupan imunisasi rutin, dua provinsi yang sangat berisiko tinggi dilihat dari cakupan vaksinasi Oral dibawah 60% pada tahun 2020. Sementara ada 13 provinsi yang warnanya merah ini adalah yang berisiko tinggi dimana cakupannya hanya berkisar 60-79%. Jika dilihat berdasarkan kabupaten kota, dari 514 kabupaten kota kita masih punya 60 yang sangat berisiko yang cakupannya dibawah 60%, kemudian ada 132 kabupaten kota yang risikonya tinggi antara 60 sampai 79% cakupannya kemudian yang risiko sedang ada 166, dan yang risiko rendah itu ada 154 kabupaten kota. Tentunya pelaksanaan PIN perlu di dukung oleh peran Tenaga Kesehatan. Responsibilitas disini merupakan respon dan sikap proaktif tenaga kesehatan terhadap kegiatan PIN, sedangkan Perspektif *Good Government* yang dimaksud disini merupakan sikap profesional yang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Untuk mengetahui Responsibilitas Pelayanan Kegiatan Pekan Imunisasi Nasional di Puskesmas Cilengkrang dalam Perspektif Good Governance sebagai upaya Eradikasi Polio. Untuk mengetahui Responsibilitas Pelayanan Kegiatan Pekan Imunisasi Nasional di Puskesmas Cilengkrang dalam Perspektif Good Governance sebagai upaya Eradikasi Polio. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 8 informant. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penanggung jawab imunisasi yang diberikan kepada seorang Bidan yang kompeten, Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (sumber daya manusia) yang baik dan Memiliki kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Kata kunci : responsibilitas, pekan imunisasi nasional, PIN, eradikasi polio

PENDAHULUAN

Virus Polio adalah Virus yang termasuk dalam golongan *Human Enterovirus* yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus Polio terdiri dari 3 strain yaitu strain-1 (*Brunhilde*), strain-2 (*Lansig*), dan strain-3 (*Leon*), termasuk *family Picornaviridae*. Penyakit ini dapat menyebabkan

kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada cornu anterior dari sumsum tulang belakang akibat infeksi virus. Virus polio yang ditemukan dapat berupa virus polio vaksin/sabin, Virus polio liar/WPV (*Wild Poliovirus*) dan VDPV (*Vaccine Derived Poliovirus*). VDPV merupakan virus polio vaksin/sabin yang mengalami

mutasi dan dapat menyebabkan kelumpuhan.

Polio dapat menyerang pada usia berapa pun, tetapi polio terutama menyerang anak-anak di bawah usia lima tahun. Pada awal abad ke-20, polio adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti di negara-negara industri, melumpuhkan ratusan ribu anak setiap tahun. Pada tahun 1950an dan 1960an polio telah terkendali dan praktis dihilangkan sebagai masalah kesehatan masyarakat di negara-negara industri. Hal ini setelah pengenalan vaksin yang efektif. Pemerintah beberapa waktu lalu menetapkan polio sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal tersebut dilakukan usai adanya temuan satu kasus baru polio di Desa Mane, Kabupaten Pidie, Aceh. Pakar Kesehatan Anak, dr. Ida Safitri Laksanawati, Sp.A (K)., mengatakan munculnya kembali kasus polio di Indonesia dikarenakan rendahnya cakupan vaksinasi. Salah satunya dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menjadikan masyarakat takut keluar rumah dan enggan mendatangi layanan kesehatan.

“Kasus polio ini terjadi karena cakupan vaksin yang rendah sehingga jadi pembelajaran untuk semuanya bersama-sama meningkatkan cakupan vaksin polio sebagai pencegahan, terutama provinsi

yang teridentifikasi dengan cakupan vaksin yang tidak terlalu tinggi.” Rendahnya cakupan vaksinasi dapat meningkatkan risiko penyebaran virus polio yang dapat mengakibatkan kelumpuhan permanen (lumpuh layu) pada anak yang belum mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, peningkatan cakupan vaksinasi menjadi sangat penting. Imunisasi polio di Indonesia saat ini menggunakan jenis vaksin polio tetes yakni *Bivalent Oral Polio Vaccine* (BOPV). Vaksin tersebut ditujukan untuk mencegah virus polio tipe 1 dan 2. Lalu pemberian vaksin BOPV dikombinasikan dengan *Inactivated Polio Vaccine* (IPV) dalam bentuk sediaan injeksi dan diikuti booster.

Vaksinasi telah terbukti bisa mencegah banyak penyakit dan menekan risiko kematian. Indonesia merupakan negara dengan risiko polio, berdasarkan capaian imunisasi rutin dalam tiga tahun terakhir. Untuk itu Kementerian Kesehatan memberikan perhatian khusus bagi wilayah yang cakupan imunisasinya masih rendah dan rawan terjadinya KLB seperti Provinsi Aceh melalui upaya pelaksanaan penguatan imunisasi rutin. Selain itu juga upaya pelacakan untuk memastikan seluruh bayi mendapatkan 4 dosis imunisasi bOPV dan 1 dosis imunisasi IPV

lengkap sesuai usia, Meningkatkan analisa dan pemanfaatan data.

Kementerian Kesehatan RI bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Advokasi dan Sosialisasi Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio Jawa Barat di Courtyard Marriot Dago, Kota Bandung, Rabu (29/3/2023). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam arahannya berharap dengan adanya Advokasi dan Sosialisasi Sub PIN Polio ini, capaian imunisasi di Provinsi Jabar semakin meningkat serta pelaksanaan di Jabar sukses dengan cakupan lebih dari 95 persen. "Pelaksanaan imunisasi merupakan perwujudan komitmen kita dalam bela negara," kata Gubernur Ridwan Kamil, yang disampaikan Sekda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja. Imunisasi melindungi warga negara Indonesia dari berbagai Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) seperti polio, difteri, hepatitis, pertusis, tetanus dan campak-rubella. "Imunisasi juga faktor dalam mencegah anak stunting. Dengan imunisasi masyarakat Indonesia akan hidup sehat, kuat, unggul, dan dapat menjadi modal awal bagi sebuah bangsa maju dan bermartabat," ucap Ridwan Kamil. "Hal ini sejalan dengan pembangunan nasional bidang kesehatan

pada RPJMN 2020-2024," imbuhnya. Maka dari itu kualitas pelayanan pada hakekatnya berkaitan dengan pelayanan yang maksimal, yakni bagaimana sikap seorang pelayan dalam melayani masyarakat. Dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kepuasan masyarakat tetapi juga dilihat dari aspek *efisiensi* dan efektivitas pelayanan.

Pelayanan yang memuaskan masyarakat dengan mengorbankan sumber daya yang besar atau terjadi pemborosan yang sangat besar bukan sebuah kualitas pelayanan. Di kesempatan Pekan Imunisasi Dunia, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH dalam sambutannya sebagai Menteri Kesehatan RI bahwa kita harus mengupayakan dalam memberikan pelayanan imunisasi yang berkualitas tinggi serta merata di seluruh nusantara. Kemudian, Indonesia terbebas dari *polio* menuju tercapainya eradikasi *polio* skala global.

Dukungan dan peran serta semua pihak di jajaran pemerintahan dan segenap lapisan masyarakat sangat diperlukan agar cakupan pelaksanaan Sub PIN di Jabar mencapai 95 persen dan dapat menyelesaikan kasus polio di Jabar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari informasi yang diperoleh, dalam perkataan yang tertulis maupun lisan dari seseorang atau pelaku yang dapat diamati.

HASIL PENELITIAN

Data diambil dari 8 informant yang mendapatkan hasil:

Responsibilitas Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Cilengkrang dalam perspektif *Good Executive Governance* Kabupaten Bandung Kecamatan Cilengkrang terjabarkan dalam beberapa poin yaitu :

1. Memiliki Komitmen Untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Dan Wewenang Tenaga Kesehatan Kecamatan Cilengkrang merasa tidak bermasalah dengan komitmen bidan dalam melaksanakan atau memanfaatkan buku pedoman KIA yang diterima. mereka mau melakukan SOP yang ditetapkan di tingkat puskesmas dan dinkes Kabupaten karena bidan merasa berkepentingan juga dalam pemanfaatan buku pedoman. ini menunjukkan bahwa mereka telah melakukan pelayanan sesuai standar

yang ditetapkan. Adanya penjelasan yaitu dalam pelaksanaan responsibilitas pelayanan imunisasi di puskesmas Cilengkrang dalam perspektif *good executive governance* Kabupaten Bandung Kecamatan Cilengkrang.

2. Komitmen terhadap Tugas

Adapun Hasil Wawancara Dengan Perawat Di Puskesmas Cilengkrang Kabupaten Bandung Kecamatan Cilengkrang. “Jadi kami disini sebagai Bidan Uj yang melayani pasien, berperang penting untuk melaksanakan tugas sebagaimana bentuk dan tanggung jawab serta komitmen kami sebagai petugas puskesmas Cilengkrang”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidan Puskesmas Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung mengatakan bahwa kami sebagai Bidan melayani pasien secara aktif sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk menangani program imunisasi nasional di Puskesmas Cilengkrang.

3. Disiplin Kerja

Bahwa setiap anggota Puskesmas memiliki keahlian khusus di mana setiap komponen melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat.

Berikut Wawancara Dengan Perawat Puskesmas Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Kecamatan Cilengkrang “masing-masing petugas puskesmas menjalankan tugas masing perawat dalam melakukan imunisasi ada yang memberikan penyediaan vaskin, ada yang menimbang bayi ada melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membawa bayinya untuk di imunisasi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat puskesmas Cilengkrang. Maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan imunisasi ada yang memberikan penyediaan vaskin ada yang menimbang bayi ada melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membawa bayinya untuk di imunisasi dan ada juga petugas yang memberikan vitamin sekaligus penyuntikan bagi anak-anak yang belum cukup umur 5 tahun. Berikut wawancara dengan kepala posyandu Cilengkrang Kabupaten Bandung Kecamatan Cilengkrang.

“Setiap masyarakat yang ingin melakukan imunisasi bagi anaknya kami melakukan proses registrasi terlebih dahulu sebelum di timbang sehingga kami mengetahui berat badan

setiap anak yang melakukan PIN di posyandu” (hasil wawancara dengan Mn). Maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap anak yang ingin melakukan imunisasi maka harus registrasi terlebih dahulu agar kiranya tertib dalam pelayanan karena biasanya masyarakat tidak tertib dalam registrasi terlebih dahulu. dan peneliti mendapatkan info dari hasil wawancara bahwa dalam program imunisasi nasional itu sangat membantu dalam hal kesehatan anak mulai dari penimbangan, pemberian vitamin dan imunisasi polio dalam Pekan Imunisasi Nasional. Oleh karena itu masyarakat sangat terbantu dengan adanya program imunisasi yang dilaksanakan setiap bulan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini pegawai puskesmas Cilengkrang kecamatan Cilengkrang.

4. Memiliki kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia. Wawancara dengan Kepala Puskesmas Cilengkrang Kabupaten Bandung Kecamatan Cilengkrang. “Kami masih mengalami kekurangan dalam hal tenaga keperawatan dimana biasanya yang melakukan suatu pekerjaan seperti timbang menimbang bayi juga dilakukan oleh pegawai sehingga tugas-

tugas atau tupoksi mereka menjadi beberapa bagian dalam hal pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Puskesmas Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Kecamatan Cilengkrang maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kurangnya tenaga medis atau perawat membuat setiap pegawai yang ada di puskesmas Cilengkrang memiliki 2 opsi setiap pegawai melibatkan nilai ganda karena satu pegawai melakukan dua pekerjaan untuk saling membantu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala puskesmas dan bidan Puskesmas Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Kecamatan Cilengkrang maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa petugas yang ada di Puskesmas Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Kecamatan Cilengkrang memiliki beberapa kendala dalam hal pelayanan karena selain kekurangan pegawai di Puskesmas dan juga pegawai mengalami kewalahan karena di wilayah kerja Puskesmas Cilengkrang.

5. Memiliki kebijakan pengelolaan sarana dan persarana. Berdasarkan wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa

masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang di berikan oleh petugas puskesmas Cilengkrang serta kader-kader posyandu yang ikut berpartisipasi dalam pelayanan imunisasi, kemudian kami selalu diberi arahan oleh kader posyandu tentang pentingnya program imunisasi. Selanjutnya kami juga berterima kasih karena setiap kami datang ke posyandu, petugas puskesmas selalu memberi obat, vitamin, dan biskuit sehingga anak-anak kami mempunyai motivasi untuk rajin ke posyandu. Karena anak-anak kami mengira posyandu itu selalu memberikan makanan jadi itu salah satunya membuat anak-anak menjadi rajin ikut imunisasi di posyandunya masing- masing

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai tentang Responsibilitas Pelayanan Imunisasi Nasional Polio Di Puskesmas Cilengkrang Dalam Perspektif Good Executive Governance Kabupaten Cilengkrang.

1. Penanggung jawab imunisasi yang diberikan kepada seorang Bidan yang kompeten, kemudian pelaksanaannya

didampingi oleh 3 orang bidan juga yang memiliki kompetensi sehingga pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat maksimal.

2. Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (sumber daya manusia). Pengelolaan dilakukan dengan setiap anggota diberikan tanggung masing di setiap desa untuk melakukan PIN di setiap desa sehingga pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat berjalan dengan baik
3. Memiliki kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sudah memadai dalam hal perlengkapan alat imunisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rohman, Ahmad & dkk. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Malang: Averroes Press.
- Atika. (2010). Imunisasi dan Vaksinasi. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Azheri, Busyra. (2012). Corporate Social Responsibility. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lisnawati. (2011). Generasi Sehat Imunisasi. JMJ, Volume 6 (1), 47.
- Muslimah, Syarifah. (2016). Responsibilitas Pelayanan Publik pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros. Makassar, Universitas Hasanuddin.
- Niken, dkk. (2019). Kebidanan Kominitas. Yogyakarta: Fitrayama.
- Pasolong, Harbani. (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Indonesia. 2015. Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2015- 2019. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonsia. 2015. Jumlah Penderita TB Paru BTA Positif. Dinkes Provinsi Jawa Timur 2016. Jawa Timur.
- Rahardian, A.H. & Rusantono, B. (2015). Pengaruh Responsibilitas dan Sikap Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Volume 7 (2), 123.
- Rindawati, Septi & Marjoyo. (2017). Resposibilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Sosiohumaniora, Volume 19 (2), 121.
- Royan Sari, Putri. (2017). Responsibilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Dan Kartu Keluarga (KK) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sinambella, Lijan Poltak. dkk. (2011). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV.Alfabeta